

Anggaran Tak Terpengaruh Pemangkasan



Sumber Gambar: KALTIM POST Minggu, 02/11/2025

Langit Nusantara siang itu tampak cerah, namun suasana di kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terasa tegang pekan lalu. Di tengah kabar efisiensi dan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono berdiri di hadapan para jurnalis dengan keyakinan penuh. Suaranya tenang namun berisi. Pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana, tanpa terimbas gelombang pemotongan anggaran nasional.

Sejak Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi pembangunan tahap II (2025-2029) pada Januari lalu, Basuki memastikan tidak ada satu rupiah pun yang berubah dari usulan Otorita IKN. Bahkan setelah palu APBN 2026 diketok DPR pada September 2025, angka itu tetap utuh. “Saya sudah bertemu Pak Menteri (Keuangan) Purbaya Yudhi Sadewa. Saya katakan, Bapak ingin memadukan kekuatan APBN, KPBU, dan swasta, dan IKN adalah ruang di mana itu bisa diwujudkan. Beliau setuju,” tutur Basuki. Pertemuan dengan Menteri Keuangan itu, kata Basuki, menjadi sinyal kuat bahwa proyek IKN mendapat dukungan penuh pemerintah pusat. Ia juga mengaku telah menjalin komunikasi intens dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), mengingat proses penganggaran kini melibatkan dua kementerian strategis tersebut.

“*Alhamdulillah* sampai sekarang, semua usulan kami disetujui. Tidak ada imbas dari kebijakan efisiensi, dan kami tetap bisa melaksanakan tugas dengan baik,” ujarnya. Namun Basuki tak menutup mata terhadap kekhawatiran publik soal kebijakan efisiensi nasional yang berdampak luas, terutama pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD). Ia menjelaskan, langkah efisiensi yang diambil pemerintah pusat yang berangkat dari prinsip penyerapan anggaran.

“Kalau DIPA tidak dijalankan, percuma saja. Tidak akan menciptakan lapangan kerja. Itulah mengapa pemerintah selalu menekankan percepatan realisasi anggaran,” tegasnya. Bagi Basuki, pembangunan IKN bukan semata proyek fisik, tetapi mesin penggerak ekonomi yang menyerap ribuan tenaga kerja dan menggerakkan sektor riil di Kaltim. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang digelontorkan, katanya, akan langsung berdampak pada masyarakat. “*Insyallah*, kebijakan efisiensi pusat tidak akan mengganggu IKN. Pemerintah pusat masih memberi dukungan penuh,” tandasnya.

Anggaran Rp48,8 triliun yang digelontorkan untuk tahap II, lanjutnya, digunakan untuk membangun kompleks legislatif dan yudikatif, sekaligus membuka akses menuju wilayah perencanaan (WP) 2. Selain itu, dana tersebut juga dipakai untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah berdiri di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP). Fase itu menjadi langkah krusial menuju target besar: menjadikan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028. Basuki menegaskan, Otorita IKN tidak hanya berfokus pada pembangunan gedung-gedung megah, tetapi juga membangun fondasi tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial yang berkelanjutan.

AKTIVITAS ILEGAL

Pengungkapan demi pengungkapan tambang ilegal, perkebunan ilegal, hingga perambahan liar di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) menggambarkan belum sterilnya ibu kota baru Indonesia dari “kontaminasi” aktivitas yang menciptakan tantangan di tengah upaya menghidupkan kembali wilayah IKN yang mengusung konsep *forest city*. Ketua Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal Irjen Edgar Diponegoro mengungkapkan, dengan total luasan daratan IKN mencapai 252.600 hektare, pihaknya telah memetakan seluas 13 ribu hektare lahan yang terkontaminasi aktivitas legal.

“Lahan yang terkontaminasi pertambangan ilegal ada 4.236 hektare dan perkebunan ilegal seluas 8.338 hektare,” ucap Edgar dalam temu media di IKN, Rabu (29/10) siang. Berdasarkan data riil terhadap kontaminasi oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab ini, maka Kepala OIKN membentuk Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal. Penanggulangan pertama dengan melakukan pencegahan terhadap kerusakan yang lebih masif. Caranya memerintahkan Deptu Sarana dan Prasarana untuk membangun pos penjagaan. “Sementara ada 10 pos yang dibangun. Di sana ada personel jaga termasuk Pamswakarsa dari masyarakat sekitar yang dananya dibiayai oleh Otorita. Lalu kami juga memasang *CCTV* yang bekerja 24 jam untuk memantau kondisi secara *real time*. Semua itu kami target bisa beroperasi di 2026 nanti,” jelas Edgar.

Setelah pencegahan, pihaknya juga melakukan penegakan hukum. Teranyar, operasi gabungan yang digelar pada 28-29 September 2025 lalu. Di mana hasil kerja sama Satgas, Polda Kaltim, Polres PPU, Polres Kukar, TNI, Kejaksaan, dan *stakeholder* terkait menemukan praktik tambang ilegal, pengangkutan batu bara tanpa dokumen, serta pemanfaatan kawasan hutan konservasi secara melawan hukum. “November nanti kami akan melakukan penegakan hukum secara masif terhadap pertambangan ilegal dengan menggandeng Ditjen Gakkum Kementerian ESDM. Kami sudah menutup satu kawasan dan sudah dipasang peringatan larangan. Kalau sampai ada yang masuk, berarti mereka melanggar. Saya sudah bisa melakukan penyidikan,” ungkapnya. Selain penegakan hukum, upaya pemulihan dan rehabilitasi juga dilakukan Otorita IKN.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna Asnawati Safitri menambahkan, jika dalam prosesnya, kawasan yang sudah rusak akibat aktivitas ilegal akan dipulihkan. Namun bagi yang masih dalam proses hukum, baru dilakukan setelah ada keputusan inkrah dari pengadilan. “Adapun yang tidak masuk proses hukum, maka pemulihannya akan dilakukan melalui kerja sama organisasi kemasyarakatan. Saat ini kami sedang dalam pembicaraan dengan NGO yang berbasis di Samarinda yang dapat pendanaan dari Pemerintah Inggris untuk merehabilitasi pada areal eks tambang sekitar 100-150 hektare, selebihnya akan dipastikan saat pengecekan lapangan,” jelas Myrna.

AIR MENCUKUPI

Dalam hasil kajian yang baru-baru ini disampaikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut ketersediaan air baku di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah sekitarnya sangat minim. Hingga, jika tidak dikelola dengan baik akan berpotensi munculnya krisis air bersih hingga dampak sosial dan lingkungan. Menanggapi kajian BRIN tersebut, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut apa yang disampaikan peneliti BRIN hanya didasarkan pada data berbasis citra satelit dan diambil pada 2022 lalu. Sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat jika tidak disertai dengan penelitian langsung di lapangan.

“Saya enggak mau membantah BRIN ya. Namun kalau ambil data berbasis citra satelit, Jakarta itu melimpah air bakunya. Dari udara Jakarta punya 13 sungai. Itu air semua. Tapi kenyataannya apa? Jakarta justru air bakunya sebagian besar diambil dari Waduk Jatiluhur di Jawa Barat,” ungkap Basuki kepada awak media di IKN, Rabu (29/10). Kata Basuki, itu menunjukkan jika sungai-sungai di Jakarta, meski airnya melimpah menurut citra satelit, namun kenyataan di lapangan tidak bisa dimanfaatkan sebagai air baku karena sudah tercemar berat.

“Jadi kalau BRIN lihat Jakarta, *beuh*, banyak airnya tapi apa? Sungai di sana banyak jadi *septic tank*. Itu bahayanya kalau kajian hanya dari citra satelit. Menurut saya isu ini harus dibenahi. Karena kejadian, waktu Pak Alimuddin (Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN) bikin Duta Pariwisata, banyak orangtua yang enggak bolehkan anaknya ke sini (IKN), takut anaknya enggak bisa mandi,” tutur Basuki.

IKN, lanjut Basuki, sudah memiliki penyelesaian dan perencanaan untuk pemenuhan air baku. Mulai dari pembangunan embung, kolam retensi, hingga bendungan. Saat ini misalnya, untuk pemenuhan air bersih, IKN mengandalkan *Intake Sepaku* yang saat ini memproduksi 300 liter per detik air bersih. “Dalam penyediaan air baku ini tentu kami punya perencanaan. Kami ada Bendungan Sepaku-Semol. Selain itu kami punya Bendungan Batu Lepek. Belum lagi nanti ada dari Arsari Group yang bakal bangun bendungan,” ucap Basuki.

Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga menambahkan, saat ini IKN masih mengandalkan air baku dari sumber permukaan. Bukan air tanah. Dengan mengandalkan Bendungan Sepaku Semol yang punya luasan areal hingga 900 hektare dengan kapasitas daya tampung 16 juta meter kubik. Mampu memproduksi air hingga 2.500 liter per detik. “Sebanyak 2.500 liter per detik itu nanti kami bagi. 1.500 untuk IKN, 1.000 untuk Balikpapan. Itu sudah cukup. Kami juga siapkan reservoir 12 ribu kubik. Air baku itu nanti diproses menjadi air bersih yang siap minum. Masalahnya memang, BRIN itu belum melihat kondisi lapangan. Dan ini sudah dijelaskan Ketua Tim Peneliti BRIN,” ucap Danis.

Sebagai informasi, sebelumnya Peneliti Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Laras Toersilowati, menjelaskan berdasarkan analisis *artificial neural network*, berbasis citra satelit, air permukaan di IKN hanya 0,51 persen. Sedangkan air vegetasi 20,41 persen, dan area non-air mencapai 79,08 persen. Untuk itu Laras merekomendasikan pembangunan lahan kota, embung, dan penerapan konsep *sponge city* untuk memperkuat cadangan air.

“Ketersediaan air di IKN menjadi isu penting. Jika tidak diantisipasi sejak awal, pembangunan besar-besaran di wilayah tersebut dapat berhadapan dengan risiko krisis air,” terang Laras seperti dikutip dari laman resmi BRIN. Laras menjelaskan hasil penelitian terbaru BRIN tersebut dalam paparannya terkait pemanfaatan data satelit dalam menganalisis perubahan iklim perkotaan di Indonesia, dalam acara *Ocean Indonesia dan Atmosphere Training Workshop*, Selasa (16/9/2025) lalu di BRIN Bandung. **(rdh/rd)**

Daftar Pembangunan/Proyek IKN Tahap II

No	Proyek/Kawasan	Skema Pendanaan	Anggaran (Triliun)	Keterangan/Cakupan Pekerjaan	Status (per Nov 2025)
1	Kompleks Legislatif (<i>Trias Politica</i>)	APBN (<i>Multiyears 2025-2027</i>)	8,5	Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, Gedung Kerja DPR/MPR	Tender tahap akhir, konstruksi dimulai Nov 2025
2	Kompleks Yudikatif	APBN (<i>Multiyears 2025-2027</i>)	3,1	Gedung Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial	Pekerjaan Awal (<i>land clearing</i>) Nov 2025
3	Istana Wakil Presiden	APBN	1,6	Gedung Utama, Lapangan Upacara, Area Taman	Progres Fisik 76% (Okt 2025)
4	Jalan KIPP 1B-1C (7 Paket)	APBN	3,04	12,2 KM, termasuk Jalan Paket A Sepanjang 1,2 KM (Lebar total 44 m dengan pedestrian)	Dalam Pelaksanaan
5	Masjid Negara IKN & Basilika	APBN	~2,0	Pekerjaan Struktur dan Arsitektur Utama	Ditargetkan selesai akhir 2025
6	Pasar Sepaku	APBN	0,3-0,4	Pusat ekonomi lokal di wilayah KIPP	Pekerjaan awal (drainase & struktur)
7	Hunian ASN & Pekerja (Kawasan 1B-1C)	KPBU	± 12,0	Sekitar 47 <i>tower</i> hunian ASN tahap awal	Sebagian unit sudah siap huni
8	<i>Financial Center</i> (Kawasan 2A)	Swasta	± 45,0	Pusat bisnis & layanan keuangan	Dalam tahap MoU dengan investor
9	<i>Education & Health District</i>	Swasta & KPBU	± 21,0	Pusat pendidikan dan layanan kesehatan modern	Dalam proses desain dan perizinan
10	Akses dan Jalan Penghubung Antar Kawasan (1A-2)	APBN & KPBU	± 2,5	Pembukaan konektivitas dan jembatan akses utama	Dalam konstruksi
11	Air Baku & IPAM Sepaku	APBN	~1,2	Optimalisasi Bendungan Sepaku Semoi dan <i>Intake</i> Sepaku 300 liter/detik	Selesai dan siap operasi

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Anggaran Tak Terpengaruh Pemangkasan, 02/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diatur bahwa pengaturan sumber daya air bertujuan untuk menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat.
2. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 3/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk:
 - a. Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara; dan
 - b. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
 - (3) Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
3. Dalam Pasal 23 UU 3/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, kekuasaan Presiden sebagai pengelola keuangan negara dikuasakan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - (2) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang untuk Ibu Kota Nusantara.
4. Dalam Pasal 24 ayat (1) UU 3/2022 diatur bahwa pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.